PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Koran Tempo Hari: Jumat Tanggal: 05 Agustus 2011 Halaman: c4

PUNGUTAN SEKOLAH

20 Pengelola Sekolah Diperiksa

"Semuanya membantah dan tidak melakukan praktek pungli."

YOGYAKARTA — Sebanyak 20 pengelola sekolah dipanggil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk dimintai keterangan soal dugaan melakukan praktek pungutan liar pada masa penerimaan siswa baru tahun ini. "Kita sudah panggil dan tanyai mereka. Semuanya membantah dan tidak melakukan praktek pungli itu," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Heri Edi Suasana kemarin.

Kementerian Pendidikan menyatakan DIY termasuk daerah yang banyak melakukan pungutan terhadap siswa baru. Dua puluh sekolah itu dipanggil itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah DIY menerima data lengkap dari Kementerian Pendidikan tentang sekolah yang perlu dimonitor dan diaudit.

Heri menuturkan, sejumlah sekolah yang dipanggil itu termasuk sekolah favorit dan berstandar internasional (RSBI). Misalnya, untuk jenjang SMA, ada SMA Negeri 3 Kota Yogyakarta, SMA Negeri 1 Kota Yogyakarta, dan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sedangkan untuk jenjang SD adalah SD Negeri Ungaran 1, yang merupakan sekolah favorit.

Menurut Heri, di SMP Negeri 2, wali murid iuran untuk membeli LCD buat kegiatan belajar. Tapi, katanya, setelah dia cek, iuran ini tidak wajib. Hanya bagi orang tua yang mampu. Bahkan ini katanya inisiatif orang tua murid sendiri, tidak dikelola oleh pihak sekolah. "Jadi, tidak masuk kategori pungutan" kata dia.

Dia menjelaskan, saat memberikan keterangan, sebagian pihak sekolah menyertakan dokumen pendukung. "Semoga memang benar tidak ada sekolah di Kota Jogja yang terlibat di DIY," ujarnya. Tapi, katanya, auditor BPKP akan melakukan pemeriksaan lanjutan hingga 26 Agustus. "Materi auditnya akan beda dengan audit rutin," kata dia.

Di Sleman, DPRD meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap sekolah yang memungut biaya dari siswa. "Yang perlu diwaspadai juga, saat penerimaan siswa baru, sekolah belum memungut biaya. Tetapi di tengah perjalanan ada pungutan," kata Arif Kurniawan, Ketua Komisi D, kemarin.

Ada sekolah yang memungut biaya dari siswa dengan alasan sudah disetujui komite sekolah. "Pungutan itu juga tidak diperbolehkan. Jika ditentukan nominalnya, maka bukan lagi suka rela, tapi pungutan paksa," katanya.

Dua SMP di Sleman menarik uang gedung kepada siswa baru dengan besaran sekitar Rp 1 juta. "Pungutan uang gedung harus dikembalikan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman Arif Haryono.

● PRIBADI WICAKSONO | MUH SYAIFULLAH

Dihaturkan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005